

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN DENGAN HEWAN

Oleh

MUHAMMAD IVANDER PHILOTHRA

Kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan dalam perspektif hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik dalam upaya melindungi hak-hak hewan dan nilai-nilai kemanusiaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan melalui kebijakan. Dan Apa yang menjadi alasan persetubuhan dengan hewan tidak diatur.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Psikolog dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah 1. Persetubuhan dengan hewan diatur oleh Undang-Undang namun secara eksplisit sehingga penanganan dan penanggulangan atas tindak pidana ini tidak maksimal, persetubuhan dengan hewan menyakiti hewan baik secara fisik ataupun secara mental, dan dampak lain yang dapat merugikan hewan secara terus menerus, persetubuhan dengan hewan yang dilakukan pelaku bukanlah suatu kecacatan mental melainkan kelainan seksual, sehingga tidak termasuk sebagai suatu alasan penghapusan pidana. 2. Pengaturan terhadap persetubuhan dengan hewan diatur secara eksplisit pada Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”, namun peraturan ini memiliki celah hukum dimana terdapat unsur cacat dan gangguan produktif sebagai landasan proses hukum dapat ditegakkan, hal ini dikarenakan aturan terkait hanya dikeluarkan terakhir pada tahun 2014 sehingga tidak mengikut arus perkembangan kejahatan dimasa sekarang, kegiatan persetubuhan yang dianggap sebelah mata dikarenakan objek atau korban merupakan hewan dan bukanlah manusia merupakan alasan utama proses hukum tidak dilalui oleh para pelaku dan efek jera atas persetubuhan dengan hewanpun

Muhamamd Ivander Philothra

tidak berlaku, hukum yang tunduk atas alasan kejahatan ringan akan menyepelekan tiap-tiap kriminalisasi jika tidak serius menangani para pelanggar hukum.

Saran dari penelitian ini adalah perlu aturan khusus yang memperbarui aturan terkait perlindungan hewan, dikarenakan aturan yang lama sudah tidak sesuai dengan era globalisasi sekarang, dan kejahatan terhadap hewan yang marak dan dianggap sepele merupakan alasan penting untuk memperbaharui undang-undang a quo. perlunya proses rehabilitasi terhadap pelaku semasa proses hukuman berlangsung, hal ini sesuai dengan para pelaku narkoba, pelaku yang mengidap kelainan sosial atau *social disorder*, maka perlu penanganan dari para psikiater untuk memberikan pendampingan agar tercapainya pemulihan untuk pelaku agar tidak melakukan hal serupa, edukasi terhadap pendidikan seksual bagi anak agar tidak mengalami proses salah belajar melalui pornografi dan menimbulkan kelainan seksual.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Persetubuhan Hewan

ABSTRAK

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW POLICY ON ANIMAL CONFECTION

By

MUHAMMAD IVANDER PHILOTHRA

Criminal policy against sexual intercourse with animals in the perspective of criminal law as a means of conflict resolution in an effort to protect animal rights and human values. The problems in this thesis are: What is the view of criminal law on sexual intercourse with animals through policy, and What causes sexual intercourse with animals is not regulated.

The problem approach used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Psychologists and Academics of the Faculty of Law, Criminal Division, University of Lampung.

The results of the research and discussion are 1. Sexual intercourse with animals is regulated by law but explicitly so that the handling and prevention of this crime is not optimal, intercourse with animals harms animals both physically and mentally, or other impacts that can harm the animal continuously, intercourse with an animal by the perpetrator is not a mental disability but a sexual disorder, so it is not included as a reason for the elimination of the crime, the reason for the emergence of sexual disorders from the perpetrator can be caused by several things, namely the process of wrong, learning, discriminatory processes that make him experience social disorders, depression and so on that cause social deviations that end in zoophilia or bestiality. 2. Regulations on sexual intercourse with animals are explicitly regulated in Article 66A Paragraph (1) of Law Number 41 of 2014 "everyone is prohibited from abusing and/or abusing animals that result in disability and/or unproductiveness", but this regulation has legal loopholes where there are elements of defects and productive disturbances as the basis for the legal process to be enforced, this is because the relevant regulations were only issued last in 2014 so that they do not follow the current development of crime, sexual activities are considered one-sided because the object or victim is an animal and not a human

Muhamamd Ivander Philothra

being. the main reason the perpetrators did not go through the legal process and the deterrent effect of sexual intercourse with animals did not apply, the law that was subject to minor crime reasons would underestimate each criminalization if it did not take law violators seriously.

The suggestion from this research is that special rules are needed to update the rules related to animal protection, because the old rules are no longer in accordance with the current era of globalization, and crimes against animals that are rampant and considered trivial are important reasons for updating the a quo law. the need for a rehabilitation process for perpetrators during the sentencing process, this is in accordance with narcotics offenders, perpetrators who suffer from social disorders or social disorders, it is necessary to handle psychiatrists to provide assistance in order to achieve recovery for perpetrators so as not to do the same thing, education on education for children so as not to experience the process of learning wrong through pornography and causing sexual disorders.

Keywords : Criminal Law Policy, Sex Animals